

KERJASAMA SISTER CITY PEMERINTAH KOTA
BANDUNG (INDONESIA) DAN PEMERINTAH KOTA
PETALING JAYA (MALAYSIA) DALAM
MENINGKATKAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF
BANDUNG TAHUN 2012-2016

*Mariane Olivia Delanova, Meizania Vania Utami Effendi,
dan Yuswari O. Djemat*

Abstract

In accordance with Law no.37 of 1999 on foreign relations and law no.32 of 2004 on regional government further strengthen the position of local government to conduct an external relationship in an effort to build its own region.

The purpose of this study is to describe more deeply about the cooperation of sister city Bandung city government in improving the creative economy industry in Bandung City and Petaling Jaya City, Malaysia with the program "Little Bandung" owned by the government of Bandung. In order to face the existence of ASEAN Economic Community (MEA). This study uses the approach of liberalism, the concept of creative economy, sister city, paradiplomasi and the theory of international cooperation. So as to illustrate the process of foreign cooperation implemented by the Government of Bandung. This research is descriptive and data collection technique through interview and literature study.

In this study it can be concluded that with the existence of law no.37 of 1999 on foreign relations and law no.32 of 2004 on local government, a benchmark on each local government to build and develop its own region through an outside relationship Country in the form of cooperation among local governments apart from the central government.

*Keywords : Sister City, Paradiplomasi, Ekonomi Kreatif,
Pemerintah Kota*

Pendahuluan

Peluang mengadakan hubungan kerjasama antar daerah sedemikian besar, mengingat landasan hukum yang diperlukan sudah ada seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan ini, Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang no.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan undang-undang no.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, telah menegaskan kedudukan Kementerian Luar Negeri untuk memainkan peranan utama dalam membantu tugas-tugas Presiden menyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri (Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, hal. 72)

Sister city adalah bentuk kerjasama antara pemerintah kota di suatu negara dengan pemerintah kota yang setingkat di negara lain. Program ini dapat mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Di sini yang perlu ditekankan bahwa setiap yang ingin bekerjasama haruslah saling menguntungkan antara daerah masing-masing.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dengan kota-kota di dalam dan di luar negeri tertuang dalam bentuk *sister city* atau dapat disebut dengan mitra kota. Kota Bandung telah memiliki program *sister city*, sebagai jembatan untuk mengembangkan potensi masyarakat Kota Bandung dalam masyarakat dunia dan menjadikan wadah bagi pengembangan kegiatan pemerintah kota Bandung dengan masyarakat dunia (Supriyanto, 2003, Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggarakan Kerjasama Internasional *Sister City*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 1, No.5)

Little Bandung adalah Program yang didirikan pemerintah Kota Bandung untuk mempromosikan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar dapat berbisnis diluar negeri pada umumnya dan pada khususnya. Dengan adanya *Little Bandung*, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi industri kreatif dengan lebih baik antara *sister city* Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya, Malaysia dan *Little Bandung* ini adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah Kota Bandung untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga Kota Bandung dapat bersaing dengan negara-negara kawasan Asia khususnya dalam bidang ekonomi kreatif.

Liberalisme

Menurut Robert Jackson & Georg Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International*

Relations menjelaskan bahwa liberalisme dalam hubungan internasional dalam asumsi-asumsi dasar liberal adalah (1) pandangan positif tentang sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konflikual; (3) percaya terhadap kemajuan (Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* terj. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*, hal.139-176.)

Dalam konsepnya tentang kerjasama internasional teoritis liberal menekankan bentuk politik dunia yang berbeda. Kaum liberal sosiologi menekankan hubungan transnasional *non*-pemerintah diantara masyarakat, seperti komunikasi diantara individu-individu diantara kelompok-kelompok.

Peneliti memandang adanya relevansi dengan pendekatan liberalisme karena pandangan positif tentang sifat manusia, artinya dalam hukum alam sifat manusia adalah baik, rasional dan mampu bekerjasama. Relevansi dengan adanya kerjasama Kota Bandung (Indonesia) dan Kota Petaling Jaya (Malaysia) mengaplikasikan sifat manusia yang rasional yang ingin bekerjasama untuk mengejar kepentingan mereka secara spesifik. Keyakinan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konflikual, relevasinya setelah perang dunia ke-2 arah hubungan internasional berubah dari konflik menjadi kooperatif karena pergeseran kepentingan dan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Maka Kota Bandung lebih mengedepankan kerjasama untuk

mengejar kepentingan mereka dengan Kota Petaling Jaya (Malaysia) yang salah satu kota yang dapat mengakomodasi kepentingan Kota Bandung.

Percaya akan kemajuan, relevansinya dengan seiring berkembangnya globalisasi serta teknologi yang semakin canggih sehingga dapat bersaing dengan kota di negara lain. Maka, Kota Bandung akan terus berupaya untuk memajukan kotanya salah satu caranya dengan pelaksanaan kerjasama *sister city* dengan salah satu kota di Malaysia yaitu Kota Petaling Jaya. Negara pada hakikatnya dibentuk oleh manusia. Oleh karena itu memiliki sifat dasar yang sama dengan manusia. Negara tidak dapat melaksanakan memenuhi kepentingan sendiri tanpa bantuan dari institusi dibawahnya maka kerjasama *sister city* kota Bandung adalah salah satu bentuk pengaplikasian kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya untuk memperluas hubungan internasional Indonesia di dunia dengan mediatornya adalah Kota Bandung.

Kerjasama Internasional

Menurut James E Dougherty dan Robert L Pfltzgraff (James E Dougherty dan Robert L Pfltzgraff, *Contending theorie Of Internasional Relations: A Comperehensive Survey 4th ed*, hal 418-419) Konsep kerjasama internasional sudah jadi kodrat alam bahwa manusia sejak dulu untuk selalu hidup bersama dan bekerjasama didalam satu kelompok. Baik disadari atau tidak kerjasama tersebut telah membuat sebuah

konsep kerjasama walaupun masih dilakukan secara acak dan tidak terorganisir. Kerjasama tersebut dilakukan demi untuk tujuan kepentingan bersama dan saling melengkapi diantara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut.

Dengan kata lain *sister city* yang dilakukan antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang melibatkan aktor didalamnya adalah antara pemerintah kota dengan pemerintah kota di negara lain, yang memiliki kesamaan antar kota tersebut. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan direalisasikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat bersama.

Sister City

Program kerjasama *sister city* atau dikenal juga dengan *town twinning* (kota kembar) merupakan suatu konsep kerjasama antara dua kota yang secara geografis dan politik serupa dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar budaya dan individu. Hubungan *sister city* dibentuk berdasarkan persetujuan formal diantara dua pemerintah lokal dari dua negara yang berbeda (Dr. H. Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional*, 2010, hal. 35).

Sister city yaitu program persahabatan antara dua kota dilintas negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, menjalin kesepahaman dan membangun persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan

sumber daya manusia sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian.

Peneliti berpendapat bahwa penggunaan *sister city* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan dengan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan. Adanya *sister city* bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing beserta kelebihan yang menonjol dari daerah masing-masing. Hal ini terlihat dari kerjasama *sister city* yang dilakukan pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dan Pemerintah Kota Petaling Jaya (Malaysia).

Paradiplomasi

Paradiplomasi sebagai kajian yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer (Wolff, Stefan, '*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*', 2009, hal. 1-2.). Kerjasama antara pemerintah Kota Bandung

dan Kota Petaling Jaya Malaysia, merupakan bentuk global paradiplomasi yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di negara Indonesia diwakili oleh kota Bandung dengan pemerintah sub-nasional di negara Malaysia diwakili oleh kota Petaling Jaya. Kerjasama luar negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat *state-centric* di mana aktor-aktor non pemerintah dapat secara leluasa melakukan hubungan internasional dengan aktor lainnya tanpa melibatkan pemerintah pusat.

Dengan adanya latar belakang munculnya *sister city* atau paradiplomasi oleh Kota Bandung di Indonesia membuat Kota Bandung dapat terus meningkatkan kerjasama tersebut di berbagai bidang lain yang dapat memberikan keuntungan positif bagi Kota Bandung, tidak terkecuali dalam meningkatkan industri ekonomi kreatif yang menjadi masalah sosial dalam penelitian ini.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sedangkan, industri kreatif adalah industri yang menghasilkan *output* dari pemanfaatan kreatifitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.

Industri kreatif memproduksi karya kreatif untuk dikonsumsi secara langsung oleh rumah tangga, perusahaan dan entitas ekonomi lainnya yang tidak hanya menghasilkan karya yang memenuhi fungsi tetapi juga nilai estetika yang dapat meningkatkan kebahagiaan konsumen yang mengkonsumsinya (Agi Syarif Hidayat & Editya Nurdian, “*Strategi Pengembangan SDM Industri Kreatif Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Pada Tahun 2016*”, (2-3 Mei 2016), Internet 03 Maret 2017).

Pada kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya, di bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu hal terpenting. Hampir semua hal yang terdapat pada memorandum Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya sejak tahun 2012 dapat menjadi landasan atau mengarah ke pengembangan pengelolaan dalam bidang ekonomi kreatif. Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya memiliki keinginan melakukan kerjasama kota bersaudara sejak tahun 2012. Bandung memiliki program untuk mempromosikan industri ekonomi kreatif yang bernama *Little Bandung*. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dan swasta melalui *Little Bandung* tersebut. Pemerintah Kota Bandung memberikan fasilitas kepada seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk bisa mempromosikan hasil produksi ke dalam negeri dan mancanegara.

Pembahasan

Sister City sering disebut *Twinning City* atau dalam bahasa Indonesia Kota Kembar adalah bentuk kerjasama antara kota yang bersifat luas, dan disepakati secara resmi serta bersifat jangka panjang. Dengan perkembangan era globalisasi, aktor dalam studi Hubungan Internasional tidak hanya negara akan tetapi semua lapisan masyarakat dapat menjadi aktor Hubungan Internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran dari pemerintah kota sebagai aktor sub-nasional semakin didorong dengan kemampuan untuk menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasama *sister city* (kota kembar).

Little Bandung merupakan fasilitas yang dibuatkan oleh pemerintah kota Bandung untuk mempromosikan industri kreatif Kota Bandung agar dapat di kenal tidak hanya didalam negeri saja melainkan dapat dikenal ke seluruh mancanegara, agar dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Little Bandung* juga merupakan Langkah yang diambil Pemerintah Kota Bandung sebagai fasilitator untuk mempermudah para industri kreatif Kota Bandung untuk dapat memperdagangkan barang produksinya secara lebih luas.

Ekonomi kreatif belakangan ini sangat sering dikampanyekan keberadaannya oleh ketua Badan industri ekonomi kreatif yaitu Bapak Triawan Munaf. Tercatat bahwa penyumbang penghasilan ekonomi terbesar terletak pada

industri kreatif. Indonesia memiliki banyak sumber daya manusianya berasal dari generasi muda yang kreatif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat dengan keterlibatan para pelaku industri kreatif. Begitu pula Kota Bandung yang menurut BPS 60-80% penduduknya adalah generasi muda aktif, maka Bandung dikenal sebagai penghasil ekonomi kreatif.

Dengan kata lain, hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian menerangkan bahwa ada relevansi dengan pendekatan liberalisme karena kerjasama Kota Bandung (Indonesia) dan Kota Petaling Jaya (Malaysia) mengaplikasikan sifat manusia yang rasional, yang ingin bekerjasama untuk mengejar kepentingan mereka secara spesifik. Keyakinan bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konfliktual. Negara tidak dapat melaksanakan memenuhi kepentingan sendiri tanpa bantuan dari institusi dibawahnya maka kerjasama *sister city* Kota Bandung adalah salah satu bentuk pengaplikasian kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya untuk memperluas hubungan internasional Indonesia di dunia dengan mediatornya adalah Kota Bandung. Kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya Malaysia, merupakan bentuk dari global paradiplomasi yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional.

Paradiplomasi memahami bahwa kerjasama internasional tidak harus dilakukan oleh negara dengan negara sebagai aktor didalamnya tetapi aktor *non-state* pun

dapat melakukan hubungan kerjasama internasional yang tertera di dalam undang-undang yang berlaku. Terlihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai kerjasama *sister city* pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dan pemerintah Kota Petaling Jaya (Malaysia) dalam meningkatkan industri ekonomi kreatif Bandung adalah salah satu bukti bahwa langkah kerjasama yang dilakukan pemerintah kota saat ini dapat menjadi peranan penting untuk menjalin hubungan kerjasama internasional.

Penutup

Kota Bandung memiliki instansi pemerintahan yang mengatur segala bentuk kerjasama dalam dan luar negeri yang bernama Bagian Kerjasama (SETDA). Bagian Kerjasama ini suatu instansi pemerintahan yang memiliki lintas kerja yang sangat tinggi. Semenjak pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil, menginginkan segala bentuk kerjasama dalam maupun luar negeri, ditangani oleh satu pintu saja yaitu Bagian Kerjasama (SETDA). Dengan adanya peraturan perundang-undangan no.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kementerian Luar Negeri tidak mengurus secara langsung kerjasama *sister city*, usulan *sister city* diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah yang ditawarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Biasanya yang dilihat oleh Kementrian Luar Negeri yaitu melihat dari kesamaan sejarah atau kota-kota yang

pernah mengikut Konferensi Asia Afrika (KAA). Bagian Kerjasama hanyalah sebagai payung atau fasilitator dari bentuk kerjasama *sister city* tersebut, untuk teknisnya diserahkan kepada *Stake Holder* atau Dinas Pemerintahan yang berkepentingan.

Little Bandung memiliki daya tarik sendiri untuk dapat bersaing dengan pelaku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Little* Bandung di Petaling Jaya, Malaysia menjadi magnet tersendiri untuk para industri kreatif kota Bandung agar dapat mempromosikan produknya lebih luas. Liberalisme menganggap positif setiap sikap manusia maka, negara tidak dapat melaksanakan kepentingan sendiri tanpa bantuan dari institusi dibawahnya sehingga kerjasama *sister city* Kota Bandung adalah salah satu bentuk pengaplikasian kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya untuk memperluas hubungan internasional Indonesia di dunia dengan mediatornya adalah Kota Bandung. Kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kota Petaling Jaya ini merupakan suatu bentuk global dari paradiplomasi yaitu di mana paradiplomasi dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai Sub-Nasional, Indonesia diwakili oleh Kota Bandung dengan Malaysia diwakili oleh Kota Petaling Jaya, tidak melibatkan secara langsung pemerintah pusat.

Referensi

- Agi Syarif Hidayat & Editya Nurdian, “*Strategi Pengembangan SDM Industri Kreatif Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Pada Tahun 2016*”, (2-3 Mei 2016), Internet 03 Maret 2017
- Budiyanto. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta :Erlangga, 2003).
- Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional*, (Bandung; Lepsindo,2010).
- James E Dougherty dan Robert L Pfltzgraff, *Contending theorie Of Internasional Relations: A Comperehensive Survey 4th ed*,(Longman, New York,1997), hal 418-419
- Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (terj. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*), (Jogjakarta: Pustaka Pelajar: 2005)
- Supriyanto, 2003, Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Kerjasama Internasional Sister City , dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 1, No.5
- Wolff, Stefan, ‘*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*’, University of Nottingham, 2009